

Pengaruh Pengawasan dan Akuntabilitas terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada SKPD di Kabupaten Gorontalo

Nurul Aulia Hasan¹, Mattoasi², Valentina Monoarfa³

Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

aulia5396@gmail.com¹, Mattoasi@ung.ac.id², valentina@ung.ac.id³

ABSTRACT

This research is related to the implementation of performance-based budgeting, so it is hoped that each use of the budget is in accordance with the organization's strategy, namely the organization's vision. The variable that is thought to have an influence on performance-based budget standards is the existence of elements of supervision and accountability. The method used is a quantitative method in measuring the influence of exogenous variables on indigenous variables. The research results show that supervision and accountability, both partially and simultaneously, have a positive and significant effect of implementing performance-based budgeting in SKPD in Gorontalo Regency.

Keywords: *Supervision; Accountability; Implementation of Performance-Based Budgeting.*

ABSTRAK

Penelitian ini berkaitan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, sehingga diharapkan agar setiap penggunaan anggaran sesuai dengan strategi organisasi yakni visi organisasi. Variabel yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja adalah adanya unsur pengawasan dan akuntabilitas. Metode yang digunakan yang metode kuantitatif di dalam mengukur pengaruh variabel eksogenus terhadap variabel indogenus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja pada SKPD di Kabupaten Gorontalo.

Kata kunci: Pengawasan; Akuntabilitas; Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya era globalisasi, organisasi sektor publik dituntut untuk meningkatkan kinerja yang baik. Dalam mewujudkan pemerintahan yang Good Governance, organisasi sektor publik memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan publik, memastikan pelayanan masyarakat yang adil dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien (Fitri, Ludigdo dan Djahhuri 2013) dalam (Jumardin et al., 2022). Pada penelitian Gurhanawan (2022) juga menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lembaga sektor publik dituntut untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga mendapatkan tekanan yang lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi, biaya social dan manfaatnya bagi publik, serta dampak negatif atas kegiatan yang dilakukan. Dapat

disimpulkan bahwa perlunya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sehingga tercapainya penyerapan anggaran guna untuk kepentingan publik dengan fokus utamanya anggaran berbasis kinerja.

Kinerja yang baik merupakan hasil yang melebihi harapan (Alhabsi, Priyono dan Bharata., 2023). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Ningsi (2022) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan penggunaan anggaran. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad, Imam, dan Ida (2020) menyatakan bahwa kinerja merupakan perbandingan yang jelas antara pekerjaan yang diselesaikan dengan hasil yang diperoleh dari pekerjaan, sehingganya kinerja yang baik dipengaruhi berdasarkan alur kerja yang efektif dan efisien. Sehingganya dapat disimpulkan bahwa kinerja tersebut merupakan hal yang penting khususnya pada sektor pemerintahan.

Penerapan anggaran merujuk pada proses mengelola dan melaksanakan anggaran yang telah disusun dengan baik dalam membantu tercapainya tujuan keuangan dan operasional dengan lebih efisien dan efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai atau berbasis kinerja. Manfaat dari diterapkannya anggaran berbasis kinerja didiskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Pada lingkup pemerintahan daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 98 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menyusun RKA SKPD yang di dalamnya megandung unsur pendapatan dan belanja.

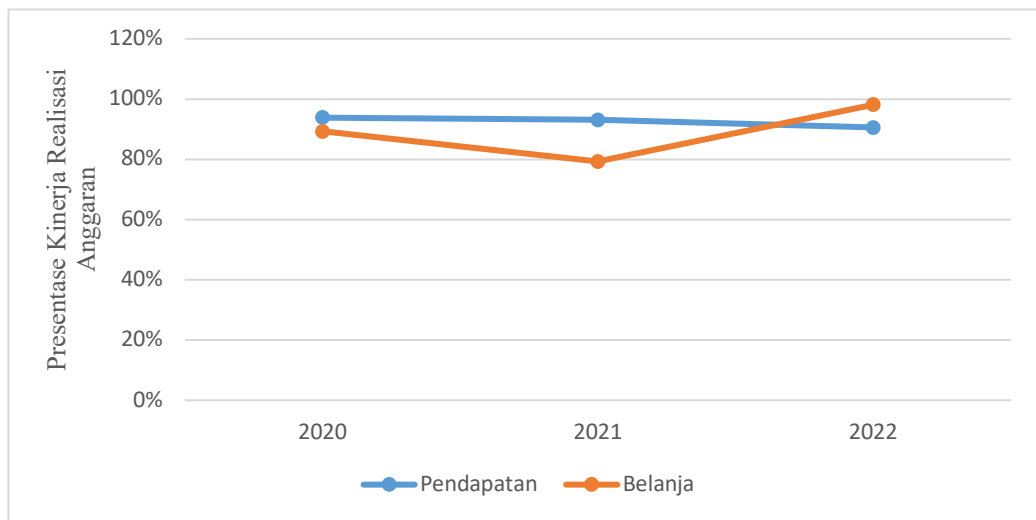
Meskipun penerapan anggaran berbasis kinerja dapat mendorong kinerja aparatur untuk dapat mencapai tujuan pemerintah yang lebih optimal, namun masih ada saja kinerja pemerintahan yang dilakukan secara tidak maksimal sehingganya pembangunan tidak mencapai target. Hal ini didukung oleh penelitian Rahayu (2020) dimana kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan pencairan dana dengan baik sehingganya dalam pemenuhan target alokasi anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja. Tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya, Shabrina dan Putra (2020) menyatakan bahwa terjadi kenaikan realisasi anggaran belanja di tahun 2017-2018 sehingganya menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berdampak positif terhadap penyerapan anggaran. Pendapat ini juga sejalan dengan penelitian Esni (2019) menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan kinerja keuangan daerah Kota Malang melalui penerapan anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan capaian tujuan yang efektif dan efisien. Demikian juga Muis, Furkan, dan Piturungsih (2020) menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja pada BLU Rumah Sakit di Wilayah Bima Nusa Tenggara Barat masih belum maksimal dikarenakan buruknya pelayanan dan transparansi terhadap anggaran. Menurut Supyani & Umam (2020) menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk realisasi atau penyerapan yang rendah

dari anggaran yang telah dianggarkan dan terdapat target indikator kinerja utama yang belum tercapai secara optimal.

Dari beberapa pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja masih belum sesuai harapan. Tidak terkecuali pada SKPD yang ada di Kabupaten Gorontalo. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik:

Grafik 1.1 Grafik Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2022

Sumber: Data diolah 2023



Berdasarkan grafik 1.1 kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Grafik 1.1 bisa dilihat bahwa terdapat penurunan kinerja realisasi anggaran pendapatan daerah pada tahun 2020-2022 dan kinerja realisasi anggaran belanja daerah berfluktuasi pada tahun 2020-2022. Selain itu, capaian kinerja realisasi anggaran masih belum tercapai secara optimal 100%.

Untuk mengatasi masalah tersebut terdapat beberapa variabel sebagaimana menurut penelitian Gani, Pananrangi, & Ismail (2022) menyatakan bahwa variabel yang digunakan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu Komitmen, Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan. Namun menurut penelitian Ramadhani, Haliah, Kusumawati, & Husni (2023) menyatakan bahwa variabel yang dapat mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya, dan Reward. Menurut penelitian Sani, Saerang, & Maramis (2023) variabel yaitu Perencanaan Anggaran, Administrasi Keuangan, dan Pengadaan Barang/Jasa. Pada penelitian Fransisca, Saiful, dan Aprilia (2021) menyatakan bahwa variabel yang digunakan yaitu akuntabilitas dan transparansi. Sehingga dalam penelitian ini disimpulkan bahwa variabel yang cocok digunakan yaitu pengawasan (X1), dan akuntabilitas (X2) yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja (Y).

Berkaitan dengan fenomena di atas maka peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa teori dan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja. Salah satu faktor dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu pengawasan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Batubara & Risna, (2020) pengawasan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Hal ini didukung oleh penelitian Gani, Pananrangi, & Ismail (2022) menyatakan bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai system pengendalian manajemen, efisien dan efektifitas pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan kinerja. Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan atau tugas dalam memastikan apakah tujuan yang diinginkan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Faktor selanjutnya yaitu akuntabilitas. Karena akuntabilitas merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam peningkatan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan terhadap pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi terkait. Hal ini didukung oleh penelitian Rohma & Sulistyowati (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja dari pemerintah daerah. Demikian juga dalam penelitian oleh Esni (2019) yang menyatakan bahwa jika pemerintah tidak bertanggung jawab penuh terhadap pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut atau tidak mengelola keuangannya dengan baik, maka kinerja keuangan pun menurun, begitu juga sebaliknya, jika pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut atau mengelola keuangannya dengan baik, maka kinerja keuangan akan naik. Dari beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sangat diperlukan dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dari individu atau organisasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya, dan mendorong tindakan yang lebih bertanggung jawab dan etis.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari Pengawasan dan Akuntabilitas terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada SKPD di Kabupaten Gorontalo.

TINJAUAN LITERATUR

Stewardship Theory (Teori Stewardship)

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*, dimana teori ini dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1989) adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi

terhadap kepentingan pribadinya. Menurut Annur & Arza (2022) Teori stewardship merupakan cara dalam mengelola organisasi publik dan personel-personel yang terkait dengan didalam organisasi tersebut. Teori stewardship ini sebagai salah satu pendekatan dalam pengelolaan organisasi yang diharapkan dapat mengatasi isu-isu yang berhubungan dengan corporate governance dan good corporate governance (Oktavianus, 2019). Teori Stewardship merupakan konsep penting dalam sektor publik yang membantu menjelaskan dasar hubungan antara pemilik dan manajer dalam perusahaan. Dalam prakteknya, penerapan teori ini dapat membantu meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan kinerja.

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja adalah penganggaran yang dilakukan manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut (Halim 2012) dalam penelitiannya (Esni, 2019). Demikian juga menurut Shabrina & Putra (2020) menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Demikian juga dengan pendapat Muis, Furkan, dan Piturungsih (2020) menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari proses penyempurnaan manajemen keuangan (anggaran negara) yang tidak terpisahkan, bertujuan untuk efektifitas dari pelaksanaan kebijakan dan program dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menghasilkan penggunaan dana publik yang lebih efisien, hasil yang lebih baik, dan akuntabilitas yang lebih tinggi, dengan perencanaan yang baik, pengawasan yang ketat, dan evaluasi berkelanjutan, penerapan anggaran berbasis kinerja dapat membawa manfaat signifikan bagi pelayanan publik dan masyarakat.

Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Batubara & Risna, 2020). Tidak jauh dari pendapat sebelumnya menurut Gani, Pananrangi, & Ismail (2022) menyatakan bahwa pengawasan merupakan penilaian sistem pengendalian manajemen, efisien dan efektifitas pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan atau peningkatan kinerja. Dari beberapa pendapat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan

merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan tujuan kinerja tercapai.

Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan Akuntabilitas menurut Fransisca, Saiful, dan Aprilia (2021) yaitu bentuk pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukan pimpinan atau lembaga berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku, dimana pertanggung jawaban tersebut disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Demikian juga menurut Esni, (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab penuh pemerintah terhadap pihak yang berkepentingan dalam informasi keuangan atau mengelola keuangan, sehingganya mencapai kinerja yang baik. Demikian juga dengan pendapat Batubara & Risna (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan dan kepuasan kinerja kepada pihak yang berkepentingan. Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip atau konsep yang mengacu pada kewajiban individu, organisasi, atau lembaga untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, kepuasan, pengelolaan sumber daya mereka dan lain sebagainya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada metode pengukuran, penggunaan pertanyaan terstruktur, dan dianalisis dengan statistik. Pada penelitian ini, peneliti menyebarkan kuisisioner pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Gorontalo.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini mengambil dinas-dinas yang terlibat langsung dalam mengelola dan menghasilkan PAD sehingganya terdapat 12 SKPD dari 30 SKPD yang ada di Kabupaten Gorontalo, dengan menggunakan Sampling Purposive berdasarkan kriteria responden yaitu pegawai yang memiliki peran dalam anggaran yang terdiri dari Kepala SKPD selaku pengguna anggaran, Kasubag keuangan, Bendahara, Pegawai akuntansi atau pembukuan keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sehingganya populasi dan sampel pada penelitian ini terdapat 72 responden, seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Populasi dan Sampel

Instansi	Jumlah Responden
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo	6
Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo	6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo	6

Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo	6
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo	6
Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo	6
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo	6
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gorontalo	6
Dinas Peternakan Kabupaten Gorontalo	6
Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo	6
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gorontalo	6
Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo	6
Total	72

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Variabel Perencanaan (X1)

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel perencanaan dalam penelitian ini sebanyak 4 pernyataan. Pernyataan dikatakan valid jika R-hitung lebih besar daripada R-tabel. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 72 responden. Dari jumlah responden tersebut dapat diketahui besarnya R-tabel adalah 0,2319 ($df = n - 2 = 72 - 2 = 70$) dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Jadi, data yang dikatakan valid ketika nilai R-hitung pada Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari R-tabel = 0,2319. Pengujian validitas tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengawasan (X1)	X1.1	0.584	0,2319	Valid
	X1.2	0.384	0,2319	Valid
	X1.3	0.654	0,2319	Valid
	X1.4	0.385	0,2319	Valid
	X1.5	0.593	0,2319	Valid
	X1.6	0.395	0,2319	Valid
	X1.7	0.455	0,2319	Valid
	X1.8	0.646	0,2319	Valid

Sumber: Data diolah 2023, SPSS Versi 26

Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X2)

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas dalam penelitian ini sebanyak 8 pernyataan. Pernyataan dikatakan valid jika R-hitung lebih besar daripada R-tabel. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 72

responden. Dari jumlah responden tersebut dapat diketahui besarnya R-tabel adalah 0,2319 ($df = n - 2 = 72 - 2 = 70$) dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Jadi, data yang dikatakan valid ketika nilai R-hitung pada Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari R-tabel = 0,2319. Pengujian validitas tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Akuntabilitas (X2)	X2.1	0.696	0,2319	Valid
	X2.2	0.618	0,2319	Valid
	X2.3	0.532	0,2319	Valid
	X2.4	0.606	0,2319	Valid
	X2.5	0.661	0,2319	Valid
	X2.6	0.677	0,2319	Valid
	X2.7	0.732	0,2319	Valid
	X2.8	0.631	0,2319	Valid
	X2.9	0.621	0,2319	Valid
	X2.10	0.549	0,2319	Valid
	X2.11	0.642	0,2319	Valid

Sumber: Data diolah 2023, SPSS Versi 26

Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Y)

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel perencanaan dalam penelitian ini sebanyak 17 pernyataan. Pernyataan dikatakan valid jika R-hitung lebih besar daripada R-tabel. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 72 responden. Dari jumlah responden tersebut dapat diketahui besarnya R-tabel adalah 0,2319 ($df = n - 2 = 72 - 2 = 70$) dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Jadi, data yang dikatakan valid ketika nilai R-hitung pada Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari R-tabel = 0,2319. Pengujian validitas tersebut sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Y)	Y.1	0.255	0,2319	Valid
	Y.2	0.460	0,2319	Valid
	Y.3	0.624	0,2319	Valid
	Y.4	0.674	0,2319	Valid
	Y.5	0.787	0,2319	Valid
	Y.6	0.562	0,2319	Valid
	Y.7	0.634	0,2319	Valid
	Y.8	0.661	0,2319	Valid

	Y.9	0.676	0,2319	Valid
	Y.10	0.653	0,2319	Valid
	Y.11	0.560	0,2319	Valid
	Y.12	0.545	0,2319	Valid
	Y.13	0.458	0,2319	Valid
	Y.14	0.443	0,2319	Valid
	Y.15	0.546	0,2319	Valid
	Y.16	0.566	0,2319	Valid
	Y.17	0.433	0,2319	Valid

Sumber: Data diolah 2023, SPSS Versi 26

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui reliable atau tidaknya suatu instrument penelitian. Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode *cronbach alpha*, dimana suatu kuisisioner dikatakan reliable jika nilai *cronbach alpha* $\geq 0,60$ (lebih besar atau sama dengan 0,60). Berikut hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	R Hitung	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Y)	0.862	0.60	Reliabel
Pengawasan (X1)	0.792	0.60	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0.823	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah 2023, SPSS Versi 26

Uji Normalitas

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa distribusi penelitian tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov Test dalam aplikasi SPSS. Berikut ini hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	4.55334196

Most Extreme Differences	Absolute	0.90
	Positive	0.48
	Negative	-0.90
Test Statistic		0.90
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.164
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah 2023, SPSS Versi 26

Berdasarkan hasil output yang tertera pada pengolahan data uji normalitas dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov Test sebagaimana tertera pada Tabel 6, maka diperoleh nilai Exact.sig. (2-tailed) untuk variabel Pengawasan (X1), dan Akuntabilitas (X2), serta Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Y) adalah 0.164 lebih besar dari 0.05 ($0.164 > 0.05$) sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan bentuk pengujian yang menyatakan bahwa independen variabel harus terbebas dari gejala multikolinieritas. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan uji multikolinieritas dengan cara membandingkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan angka 10. Jika nilai VIF < 10 atau memiliki Tolerance $> 0,1$, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas. Berikut ini hasil uji multikolinieritas melalui nilai VIF:

Tabel 7. Nilai Tolerance dan VIF

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengawasan (X1)	0.599	1.669
	Akuntabilitas (X2)	0.599	1.669
a. Dependent Variable: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Y)			

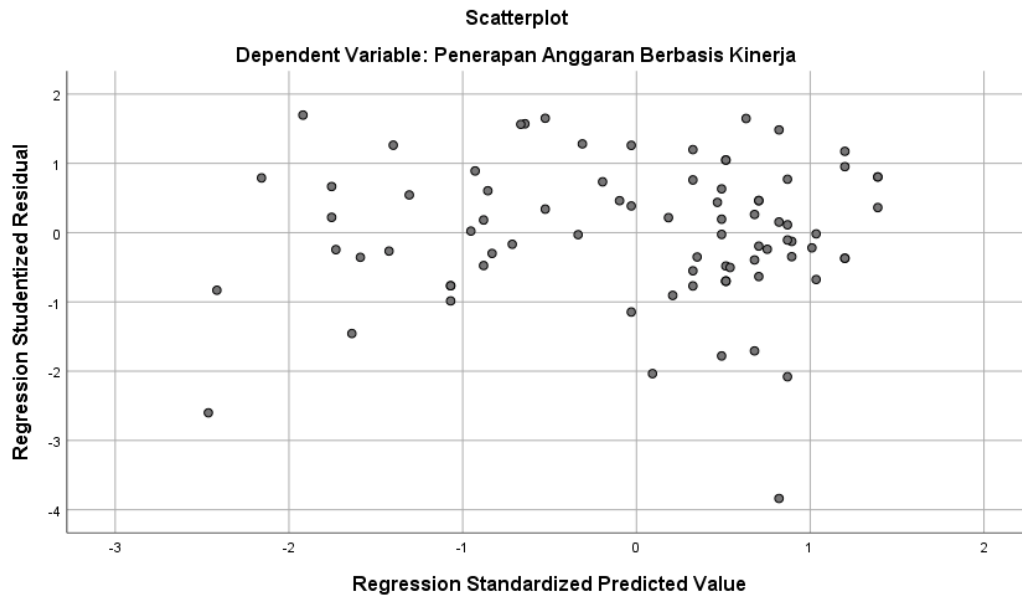
Sumber: Data diolah 2023, SPSS Versi 26

Dari hasil analisis pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa Nilai Tolerance untuk variabel perencanaan (X1) yaitu $0.599 > 0,1$ serta nilai VIF $1.669 < 10,00$. Selanjutnya untuk variabel akuntabilitas (X2) memperoleh Nilai Tolerance sebesar $0.599 > 0,1$ serta nilai VIF $1.669 < 10,00$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada masing-masing Independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan uji scatterplot untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika titik-titik menyebar secara merata diatas maupun dibawah angka nol. Berikut ini hasil uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji scatterplot:



Gambar 1.1 Hasil Uji Scatterplot
 Sumber: Data diolah 2023, SPSS Versi 26

Dari hasil analisis pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa seluruh titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka nol dan penyebaran titik-titik data tidak berpola sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara atau secara individu antara Pengawasan (X1), dan Akuntabilitas (X2), terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Y). Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.858	7.842		2.660	0.09
	Pengawasan	0.685	0.261	0.301	2.622	0.11
	Akuntabilitas	0.596	0.177	0.386	3.367	0.01

a. Dependent Variable: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Sumber: Data diolah 2023, SPSS Versi 26

Berdasarkan tabel di atas hasil pengujian pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengawasan terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bawa nilai t-hitung sebesar ($2.622 \geq 1.99495$) atau nilai probabilitas sebesar ($0.11 < 0.05$) maka H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja pada SKPD di Kabupaten Gorontalo
2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bawa nilai t-hitung sebesar ($3.367 \geq 1.99495$) atau nilai probabilitas sebesar ($0.01 < 0.05$) maka H2 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja pada SKPD di Kabupaten Gorontalo.

Uji Simultan (Uji f)

Uji ini digunakan untuk mengetahui secara keseluruhan dalam penelitian ini. Uji f (uji simultan) digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel Pengawasan (X1), dan Akuntabilitas (X2) terhadap Penerapan Anggaran Anggaran Berbasis Kinerja (Y). Kriteria pengujian simultan yaitu jika F hitung < F tabel maka tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika F hitung > F tabel maka ada pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1043.687	2	521.844	24.541	.000 ^b
	Residual	1658.634	70	21.265		
	Total	2702.321	72			
a. <i>Dependent Variable:</i> Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja						
b. <i>Predictors:</i> (Constant), Akuntabilitas, Pengawasan						

Sumber: Data diolah 2023, SPSS Versi 26

Dari Tabel 9 menunjukkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 24,541 > F tabel sebesar 3.1333 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 sehingga lebih < 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan (X1), dan akuntabilitas (X2), berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan anggaran berbasis kinerja (Y).

Koefisien Determinasi (R Square)

Analisis koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil analisis koefisien determinasi.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.621	0.386	0.370	4.611
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Perencanaan				

Sumber: Data diolah 2023, SPSS Versi 26

Pada tabel 10 menunjukkan nilai R square sebesar 0.370 atau 37.0 % hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dijelaskan oleh variabel pengawasan dan akuntabilitas sebesar 37.0% sedangkan sisanya 63.0% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada SKPD di Kabupaten Gorontalo

Dari hasil perhitungan uji hipotesis (Uji t) dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja pada SKPD di Kabupaten Gorontalo, Maka hipotesis kedua yaitu “pengawasan berpengaruh positif terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja pada SKPD di Kabupaten Gorontalo” diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gani, Pananrangi, & Ismail (2022) menyatakan bahwa pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Pengawasan dapat berpengaruh positif karena terdapat pelaksanaan pengawasan yang baik kepada pegawai yang berbuat kesalahan yang mempengaruhi aktivitas kinerja pegawai. Pendapat tersebut sejalan dengan Batubara & Risna (2020) yang menyatakan semakin tinggi pengawasan yang dilakukan maka kinerja anggaran akan semakin meningkat. Demikian juga dengan Rosmarini, Sari, dan Anggraini (2018) menyatakan bahwa pengawasan yang baik karena dipengaruhi oleh pimpinan, pegawai maupun personil dari satuan kerja lainnya.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada SKPD di Kabupaten Gorontalo

Maka hipotesis kedua yaitu “akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja pada SKPD di Kabupaten Gorontalo” diterima. Menurut hasil peneltian Fransisca, Saiful, dan Aprilia (2021); Anandah dan Aufa (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerapan penggaran berbasis kinerja, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat akuntabilitas pada suatu OPD, maka akan semakin akuntabel anggaran pada OPD sehingga akan meningkatkan efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja pada OPD. Sejalan dengan pendapat Batubara & Risna (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi akuntabilitas atau tanggungjawab maka kinerja keuangan semakin baik dan meningkat.

Pengaruh Pengawasan dan Akuntabilitas Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada SKPD di Kabupaten Gorontalo

Dari hasil perhitungan uji hipotesis (Uji f) dapat disimpulkan bahwa pengawasan (X1), dan akuntabilitas (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja, dengan demikian hipotesis keempat yaitu "perencanaan dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja pada SKPD di Kabupaten Gorontalo" diterima. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Irawati & Yusnita (2017) yang menyatakan bahwa perencanaan dan regulasi berpengaruh secara simultan terhadap anggaran berbasis kinerja. Demikian juga dengan pendapat Gani, Pananrangi, & Ismail (2022) yang menyatakan bahwa komitmen, sumber daya manajemen, dan pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Fransisca, Saiful, dan Aprilia (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap penerapan penggaran berbasis kinerja pemerintah.

Setelah melakukan uji f kemudian untuk melihat sasaran besaran pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji R yang kemudian menunjukkan bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dijelaskan oleh variabel pengawasan dan akuntabilitas sebesar 37% sedangkan sisanya sebesar 63.0% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Pengaruh secara simultan sebesar 37% tersebut termasuk dalam kategori berpengaruh lemah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat memberikan kesimpulan yaitu Variabel pengawasan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja (Y) pada SKPD di Kabupaten Gorontalo, Variabel akuntabilitas (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja (Y) pada SKPD di Kabupaten Gorontalo, Pengawasan (X1), dan Akuntabilitas (X2) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja (Y) pada SKPD di Kabupaten Gorontalo sebesar 37.0% dan masih terdapat pengaruh variabel lain yang ada dalam struktur teori namun tidak disertakan dalam penelitian senilai 63.0%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan maka peneliti memberikan saran yaitu: Pengawasan sebaiknya dimaksimalkan karena dengan adanya pengawasan yang baik kepada pegawai yang berbuat kesalahan, maka akan memperbaiki aktivitas kinerja. Akuntabilitas juga sebaiknya dimaksimalkan karena dengan adanya akuntabilitas maka akan memperkuat praktik dan kebijakan dalam memastikan pertanggungjawaban yang efektif dan transparansi di berbagai tingkatan organisasi. Penerapan anggaran berbasis kinerja berdasarkan hasil uji determinasi dalam penelitian ini, variabel perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas mampu menjelaskan tentang penerapan anggaran berbasis kinerja sebesar 37.0% dan sisanya sebesar 63.0% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Maka kepada para peneliti selanjutnya yang tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan topik yang serupa dengan penelitian ini agar dapat menguji variabel lain yang dapat mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja pada SKPD di Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhabsi, R. H., Priyono, N., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 213–220.
- Annur, Y. G., & Arza, F. I. (2022). Pengaruh Tata Kelola, Komitmen Organisasi dan Reward terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 738–750. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.579>
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 95–109. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Elmi, D. R., & Endah S., (2022). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas instansi pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 10(11), 2460-0585 <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4855/4857>
- Esni, M. T. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. 8(2), 1–11.

- Fitri, S. M., Ludigdo, U., & Djamhuri, A. (2013). Pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, reward, dan punishment terhadap anggaran berbasis kinerja (studi empirik pada Pemerintah Kabupaten Lombok). *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi Disetujui: Agustus Syarifah Massuki Fitri*, 5(2), 157-171. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>
- Fransisca, F., Saiful, S., & Aprila, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 8(3), 171-182. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207>
- Gani, F. S., Pananrangi, A. R., & Ismail, I. (2022). Pengaruh Komitmen, Sumber Daya Manajemen, Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. *J. Paradigma Administrasi Negara*, 4(58), 79-84.
- Gurhanawan, G. (2022). Analisis laporan realisasi anggaran sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan pada kantor inspektorat pembantu wilayah kerja Jakarta Barat. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 1(3), 137-143. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/co-creation/article/view/527>
- Jumardin, Sjarlis, S., & Idris, M. (2022). Pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan reward terhadap anggaran berbasis kinerja pada dinas transmigrasi provinsi sulawesi barat. *The Manusagre*, 1(1), 29-39.
- Lubis, I. T., & Ningsi, E. H. (2022). Enrichment: Journal of Management is Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) Enrichment: Journal of Management Determinants Of Financial Performance In Local Governments In District/City In Indo. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2385-2390.
- Mokhammad, F., Imam Nazarudin, L., & Ida, R. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pada Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Periode 2017-2020. 1(2), 1182-1192.
- Muis, A., M. Furkan, L., & Pituringsih, E. (2020). Determinan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Se-Pulau Sumbawa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2657. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p17>
- Nina Anggraini Anandah, M. A. (2023). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. IV(April), 55-66.
- Oktavianus Pasoloran, And Firdaus Abdul Rahman. 2019. "Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor

Publik". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 3 (2), 419-32

Permendagri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Ramadhani, P., Haliah, H., Kusumawati, A., & Husni, M. (2023). Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Dan Reward Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 52–59.

Rosmarini, T., Sari, R. N., & Anggraini, L. (2018). Pengaruh pengawasan intern, sistem anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (studi empiris pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). *JOMFekom*, 3(1), 1–13. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>

Sani, A. A., Saerang, I. S., & Maramis, J. B. (2023). Analysis of Factors Affecting the Effectiveness of Budget Absorption at Regional Office XI of the State Civil Service Agency CAJITMF. *Central Asian Journal Of Innovations On Tourism Management And Finance*, 04(07), 2660–454X. <https://cajitmfcentralasianstudies.org/index.php/CAJITMF>

Shabrina, H. K., & Putra, S. S. (2020). Pengaruh Ability, Legitimacy, dan Acceptance terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Periode Tahun Anggaran 2017-2018 (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11, 955–961.

Supyani, S., & Umam, K. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 2(3), 130–138. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i2.9072>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara